



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH

**RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI DENGAN
KETUA DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA,
KETUA PAIKATEN PENYULUH BAHASA BALI, KETUA DPP ALIANSI
HONORER NASIONAL (AHN), KETUA PENGURUS PUSAT IKATAN
BIDAN INDONESIA, KETUA SOLIDARITAS WIYATABAKTI NASIONAL
INDONESIA, KETUA FORUM GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
INDONESIA, KETUA FORUM GURU PRIORITAS PERTAMA NEGERI DAN
SWASTA NUSANTARA, KETUA KOMUNITAS PENGAJAR BAHASA
JEPANG PROVINSI BALI, KETUA FORUM PENYULUH NUSANTARA,
KETUA FORUM KOMUNIKASI PEGAWAI KONTRAK NON ADMINISTRASI
PEMERINTAH BALI, DAN LAW FIRM K SOFJAN & PARTNERS**

Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : V
Rapat ke- : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal Rapat : Rabu, 19 Juni 2024
Waktu Rapat : Pukul 10.26 s.d. 12.07 WIB.
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III
Gedung Nusantara I DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Ketua Rapat : Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P. (Wakil
Ketua/F-PDIP)
Acara Rapat : Penyampaian aspirasi masyarakat terkait
permasalahan penataan non-ASN
Sekretaris Rapat : Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
(Kabag Set. Komisi II DPR RI)
Hadir : 8 dari 49 orang Anggota dengan rincian:
A. ANGGOTA DPR RI
PIMPINAN:
1. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P
(Wakil Ketua/F-PDIP)

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN
1 orang Anggota dari 11 Anggota

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
3 orang Anggota dari 7 Anggota
 1. Drs. H. Riswan Tony DK
 2. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
 3. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
1 orang Anggota dari 7 Anggota
 1. H. Rahmat Muhajirin, S.H.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM
1 orang Anggota dari 5 Anggota
 1. Kamran Muchtar Podomi, S.T.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
0 orang Anggota dari 4 Anggota
-

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
1 orang Anggota dari 5 Anggota
 1. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
0 orang Anggota dari 4 Anggota
-

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
1 orang Anggota dari 4 Anggota
 1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
0 orang Anggota dari 2 Anggota
-

ANGGOTA YANG IZIN/SAKIT

1. Drs. Difriadi (F-P.Gerindra)

B. UNDANGAN

1. Ketua Dewan Pengurus Nasional FKHN Indonesia
(Sepri Latifan);
2. Ketua Paikaten Penyuluh Bahasa BALI
(I Wayan Suarmaja, S.Pd.B.);
3. Ketua DPP Aliansi Honoror Nasional (AHN)
(Retno Edi Kurniadi);
4. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia;
5. Ketua Solidaritas Wiyatabakti Nasional Indonesia;

6. Ketua Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia
(Abraham Pellokila);
7. Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta Nusantara
(Hasna);
8. Ketua Komunitas Pengajar Bahasa Jepang Provinsi Bali;
9. Ketua Forum Penyuluh Nusantara
(Ni Ketut Adriyani);
10. Ketua Forum Komunikasi Pegawai Kontrak Non Administrasi Pemerintah Bali;
11. Advokat Law Office K Sofjan and Partners.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Sudah? Boleh kita mulai?

Pak Gaus?

Pak Bagus?

Ada Bu Rieke di sini, Rieke Diah Pitaloka, ya. Ini beliau menyempatkan ke sini berarti memperjuangkan hak Bapak/Ibu juga, ya?

Bu Rieke Diah Pitaloka, kalau enggak salah urusan bidan, ya? Bu Rieke ya? Bidan, ya?

Baik Bapak/Ibu sekalian,

Kita mulai, ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Rahayu,

**Yang terhormat Ketua Dewan Pengurus Nasional FKHN Indonesia,
Ketua Ikatan Penyuluh Bahasa Bali,**

Ini dari Pak Bagus, ya?

**Ketua DPP Aliansi Honorer Nasional/AHN,
Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia,**

Ini Bu Rieke Diah Pitaloka kali.

Ketua Solidaritas Wiyata Bakti Nasional Indonesia,

Ada?

Enggak ada, ya.

Ketua Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia,

Ada?

**Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta Nusantara,
Ketua Komunitas Pengajar Bahasa Jepang Provinsi Bali,**

Konichiwa onades nandesuka.

**Ketua Forum Penyuluh Nusantara,
Ketua Forum Komunikasi Pegawai Kontrak Non Administrasi Pemerintah
Bali,**

Ini ada yang dari *law firm* ini, sudah hadir enggak?

Law firm K. Sofyan & Partners,

Tidak ada, ya?

Dan yang kami banggakan Anggota Komisi II DPR RI,

Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puja dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri rapat pada hari ini dalam keadaan sehat *walafiat*.

Bapak/Ibu sekalian,

Rapat ini tidak perlu dan atau tidak memerlukan kuorum karena dalam rapat ini kami tidak mengambil keputusan, tetapi hanya menampung aspirasi dan nanti boleh kita buka sesi diskusi yang singkat. Maka untuk itu, perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.26 WIB)

Kok enggak ada tepuk tangan ini. Enggak usah kaku-kaku, Pak. Tenang tenang saja.

Sudah dapat *snack* enggak?

Snack sudah datang enggak di meja masing-masing?

Sudah?

Belum?

Kalau yang di, apa namanya, biasanya kalau paling tinggi itu biasanya belakangan.

Kita santai saja, Pak. Santai, tetapi tetap resmi kita. Jadi *ndak* usah kaku-kaku. Ini, apa, kantor rakyat di sini. Ya kantor rakyat, santai saja. Ini kantor Bapak/Ibu semua dan kami hanya wakil Bapak/Ibu di sini. Sesungguhnya, Bapak/Ibu yang punya kantor ini, ya.

Sesuai agenda yang telah disepakati bahwa acara rapat hari ini adalah Rapat Dengar Pendapat Umum ataupun audiensi, yaitu Penyampaian Aspirasi Masyarakat Terkait Permasalahan Penataan Non-ASN.

Bapak/Ibu sekalian,

Sebelum kita lanjutkan, kita sepakati dahulu bahwa rapat ini kita akhiri pada pukul.

Pukul berapa, Pak Gaus?

Paling lama 11.30. Kalau memang kurang waktu nanti kita perpanjang, Pak. Ya, yang jelas sebelum makan siang sudah harus selesai karena kami juga harus mendengar rapat yang lain nanti.

Setuju, ya?

Setuju, Bapak/Ibu?

Eggak usah takut lihat saya, Pak. Mestinya takut lihat Ibu Rieke. Saya enggak, enggak galak kok, cuman tampang saja. Eggak galak saya.

Oleh karena itu, Komisi II DPR RI akan mendengarkan secara langsung penjelasan terkait pokok-pokok pikiran maupun aspirasi serta sekaligus nanti kita lanjutkan dengan diskusi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum ini sesuai dengan tujuan kita pada pertemuan hari ini.

Bapak/Ibu sekalian,

Saya hanya menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang 20/23 tentang ASN khusus di Pasal 66 disebutkan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan. Ya, wajib diselesaikan penataannya paling lambat pada bulan Desember 2024.

Kalau saya paling ingat pada tanggal 24 Desember tahun 2024. Ya, saya paling ingat itu, Pak. Ya dan sejak undang-undang ini mulai berlaku,

instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN.

Nah, sekarang ini berkembang ada sudah mulai kembali diangkat sukarelawan, Bu Rieke. Sukarelawan di setiap Pemkab/Pemkot tetapi tidak semua, ya. Walaupun undang-undang sudah mengatur di Pasal 66, tidak boleh. Tetapi ada istilah lain, tenaga sukarelawan ya.

Tolong sampaikan pada Saudara-saudara kita kalau itu ada jangan mau, ya. Itu akan membuat blunder nanti.

Dan di Pasal 68 tentang peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama enam bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

Silakan yang pertama kami serahkan kepada Ketua Dewan Pengurus Nasional FKH Indonesia ya, untuk menyampaikan secara singkat saja, Pak. Nanti ada pendalaman juga dari kami, ya. Paling lama lima menit.

Silakan, Pak.

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA (SEPRI LATIFAN):

Bismilahirrahmanirrahim.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Walaikumsalam.

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA (SEPRI LATIFAN):

Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Salam sehat,
Rahayu,
Rahayu,
Rahayu,

Terima kasih Pimpinan Rapat Dengar Pendapat di Komisi II dan kepada Bapak/Ibu Anggota Komisi II DPR RI yang telah membuka ruang diskusi dengan seluruh tenaga non-ASN, ya, yang bekerja di Fasyankes Pemerintah.

Izin, Pimpinan.

Iya, tadi ada paparan mungkin masih menunggu.

Perkenalkan saya Sepri Latifan kebetulan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Nonnakes Indonesia atau FKHN Indonesia.

Kita sudah advokasi selama tiga tahun kurang lebih, Pimpinan Bapak/Ibu semuanya, untuk tadi Pimpinan sudah menjelaskan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwasanya penyelesaian penataan masalah non-ASN harus selesai hingga Desember 2024. Ini amanat Undang-Undang yang harus dijalankan tetapi sekarang sudah memasuki pertengahan tahun 2024 kita masih belum melihat bagaimana keseriusan Pemerintah dalam penyelesaian ini. Mungkin masih ada jutaan tenaga non-ASN yang nasibnya masih belum jelas. Ini yang harus, yang kita minta bantuan ke Komisi II untuk mengawal sesuai dengan fungsinya dalam pengawasan.

Beberapa kesempatan, iya ini ada paparan boleh dibantu, *next*.

Iya ini amanat, *next*, lanjut.

Iya, ini yang jadi pertanyaan beberapa kali Kementerian PANRB sebagai regulator dalam penyelesaian masalah non-ASN itu mengedepankan, Pimpinan, bahwasanya memprioritaskan tenaga non-ASN yang sudah masuk dalam *database* BKN. Lalu, bagaimana nasibnya teman-teman kita yang tidak masuk dalam *database* BKN?

Padahal kalau kita melihat dari lama pengabdian, teman-teman yang tidak masuk dalam *database* BKN itu ada yang sudah mengabdikan belasan, bahkan ada yang 20 tahun, Pimpinan.

Sepertinya tidak bijak bila Pemerintah melalui Kementerian PANRB hanya memprioritaskan dalam *database* BKN. Ini masuk atau tidaknya dalam *database* BKN, ini karena sumber penggajian. Yang masuk dalam *database* BKN, sumber penggajiannya APBD. Yang tidak masuk itu melalui BLU, BLUD. Padahal mereka pengabdian sudah lama.

Berikutnya.

Iya, ini gambaran skema yang disiapkan oleh Kementerian PANRB. Dua tahun sebelum sebelumnya, rekrutmen menggunakan *database* SISDMK untuk di sektor kesehatan. *Nah*, untuk tahun 2024 kita masih belum melihat juknisnya.

Berikutnya.

Nah, kami berharap betul kepada Komisi II yang merupakan mitra kerja dari Kementerian PANRB dan juga Kementerian Dalam Negeri dan Badan

Kepegawaian Negara untuk mendorong dan mengawasi kerja-kerja dari Kementerian-Kementerian terkait agar penyelesaian masalah non-ASN ini betul-betul berdampak baik kepada yang sudah mengabdikan.

Berikutnya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Sebentar, Pak Ketua. Saya potong ya, biar kita langsung saja ya, biar singkat.

Yang pertama, bicara *database* BKN.

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA (SEPRI LATIFAN):

Betul.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya, disebutkan tidak masuk dalam *database*. Kan begitu, ya?

Nah, pertanyaan kami, apa kendalanya kok tidak bisa masuk?

Karena ketika rapat dengan Menteri PANRB dan BKN, itu terbuka mereka punya *website*.

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA (SEPRI LATIFAN):

Siap.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Nah, kendalanya apa ini? Kendalanya.

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA (SEPRI LATIFAN):

Siap.

Izin, Pimpinan. Itu berdasarkan SE dari Kementerian PANRB, itu untuk yang masuk dalam *database* BKN, itu yang sumber penggajiannya APBD.

Ada dua sumber penggajian, Pimpinan. Ada yang sumber penggajiannya APBD, ada yang sumber penggajiannya BLUD.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Begini, begini, Pak. Ya kita tidak pernah tahu dan kita tidak mau tahu tentang penggajian.

**KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA (SEPRI
LATIFAN):**

Betul.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Tetapi kesepakatan dan sudah masuk dalam Keputusan Kesimpulan di Rapat Komisi II dengan Menteri PANRB dan BKN itu, ya semua tenaga honorer tanpa terkecuali, ya Pak ya, mau bidan, mau OB, mau apa segala macamnya itu ya, harus sudah diangkat paling lambat 24 Desember 2024.

**KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA (SEPRI
LATIFAN):**

Siap.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Dengan tanpa syarat ketika dia sudah menjadi tenaga honorer, ya, selama lima tahun berturut-turut tanpa terputus.

**KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA (SEPRI
LATIFAN):**

Siap.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Itu, Pak

Nah, itu, Pak. Dalam Kesimpulan itu ada.

Jadi kalau disebutkan, apa namanya, tidak diangkat tentu itu sudah melanggar undang-undang, Pak.

**KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA (SEPRI
LATIFAN):**

Siap, siap, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Itu satu.

Ini biar kita *clear* semua di sini dan tidak perlu *debatable* kita berdebat di sini.

Yang kedua, tentang adanya, apa namanya, ujian kalau istilah saya. Saya pernah tanya kepada Kementerian dan kepada Kepala BKN, "Kok masih di ada ujian?"

Ternyata itu hanya untuk, apa namanya, mempredikasi saja, Pak. Formalitas saja itu. Ya supaya semua punya nomor, nomor induk apa begitu, saya lupa nomor induk apa, itu satu.

Kedua, untuk MenPANRB, KemenPANRB dan BKN itu bisa mempredikasi banyaknya tenaga-tenaga honorer siluman.

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA (SEPRI LATIFAN):

Betul.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ya. *Nah*, maka dalam rapat ini saya sampaikan, Pak Gaus sampaikan juga, dan Teman-teman sampaikan supaya KemenPANRB, BKN itu melakukan audit. Iya kan? Bekerja sama dengan BPKP untuk menemukan para tenaga honorer siluman itu, Pak.

Saya banyak menemukan tenaga honorer siluman, tidak pernah tenaga honorer tetapi namanya masuk diajukan ke KemenPAN BKN. Nama yang honorer tidak masuk, yang tidak honorer yang masuk. *Nah*, itu siluman, Pak.

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA (SEPRI LATIFAN):

Siap, siap.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Jadi bukan hanya mafia tanah yang ada sekarang, mafia judi, mafia tenaga honorer juga sudah ada, Pak.

Nah, ini kita perlu selesaikan ya dalam forum ini.

Nah, mengenai *database* itu ya, Saudara Ketua Dewan Pengurus Nasional FKHN, mereka punya *website*, masukkan saja, Pak. Nah, ketika itu sudah masuk, tolong serahkan kepada kami Komisi II.

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA (SEPRI LATIFAN):

Siap.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Supaya kami bisa, apa namanya, melakukan rapat dengan KemenPANRB dan BKN menyampaikan langsung dalam forum ini, ini *loh*.

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA (SEPRI LATIFAN):

Siap.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ya, yang sudah, sudah masuk ke *database* tolong ditindaklanjuti. Dan itu sudah sering kita lakukan di dalam rapat dengan Kementerian, Kementerian PANRB dan BKN.

Nah, maka ketika Bu Rieke Diah Pitaloka, doktor kita ini, bertanya kepada saya tentang Saudara-saudara para bidan yang, yang sudah mengeluarkan kami ke dunia ini.

Ya, kan bidan Pak, ya yang mengeluarkan ke dunia ini. Tanpa bidan, saya terus terang lahir karena bidan, Pak. Ibu saya juga bidan. Ya, ibu saya bidan, ya bidan.

Ketika Beliau bertanya, "Kok tidak bisa masuk ke *database*?"

Saya bilang, "Ya bisa. Kenapa enggak bisa?" Iya kan?

Jadi kalau Saudara kita mengatakan masalah penggajian ya, dari APBD.

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA (SEPRI LATIFAN):

APBD.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

APBD, segala macam. Enggak ada itu, Pak. Enggak ada diatur BLU, ya? BLUD, ya?

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA (SEPRI LATIFAN):

BLUD.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

BLUD, ya?

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA (SEPRI LATIFAN):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Itu enggak ada diatur, Pak. Ya, enggak ada diatur.

Jadi, saran kami ya kepada semua tenaga honorer, ini dalam forum resmi dan ini pasti media-media DPR ada di sini semua, ya.

Kepada semua tenaga honorer yang sudah lima tahun berturut-turut tanpa terputus, maka mereka wajib diangkat menjadi PPPK. Itu, Pak.

Kepada semua saudara-saudara kami para tenaga honorer yang sudah lima tahun berturut-turut menjadi honorer tanpa terputus, maka mereka wajib dengan tanpa syarat diangkat menjadi PPPK. Ini, Pak.

Nah, oleh karena itu, tolong kepada kami diberikan data-datanya nanti, Pak.

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA (SEPRI LATIFAN):

Siap.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Jadi jangan suruh kami mendaftar, Pak, ke *database*. Ya kalau Bapak/Ibu sudah mendaftarkan terus teman-teman yang di tribune sudah mendaftarkan, tolong kasih ke kami, Pak.

Ini kan ada forumnya semua ini. Ada Dewan Pengurus, ada apa namanya, ada Aliansi Honorer Nasional. Tolong panggil kasih ke kami, Pak

Gaus nanti bisa serahkan langsung kepada Pak Menteri, pada Kepala BKN karena kalau enggak salah.

Ini rapat dengan MenPAN kapan Pak, ya?

Kapan lagi, ya?

Di bulan.

Oh, siapa yang berangkat haji?

Iya, lagi berangkat haji, Pak.

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA (SEPRI LATIFAN):

Siap.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ya, beliau juga lagi berdoa di sana untuk teman-teman tenaga honorer supaya enggak ada kendala untuk diangkat menjadi PPPK. Iya itu, Pak.

Nah, sekembali beliau dari haji nanti, kami akan atur jadwal untuk melakukan rapat resmi. Ya termasuk hasil pertemuan kita hari ini.

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA (SEPRI LATIFAN):

Siap.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Itu, Pak Ketua.

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA (SEPRI LATIFAN):

Siap.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ini kan sudah jelas saya sampaikan, ya. Jadi kita tidak perlu banyak berbicara di sini. Dengan tegas kami sampaikan ada di sini Pak Gaus, ada Pak Bagus, ada Bu Rieke, ada Pak Agung, ada Pak Kamran ya, ada ibu kami di sini yang senior.

Ibu, bidan ya?

Ibu, bidan?

Pensiunan?

Oh, saya nanti tanya ibu saya. Ibu saya sekarang umur 95 tahun apakah beliau terdaftar sebagai mantan bidan juga.

Masih, *Alhamdulillah* masih sehat. Ada di, umur 95.

Ada di rumah saya, ya.

Ros Diana Munte. Nanti dicek, iya.

Saya bisa sekolah karena bidan, Bu. Iya kan.

Bu Rieke bisa lahir pasti karena bidan.

Ya, saya kira itu, Pak Ketua. Masih ada yang lain mau disampaikan?

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA (SEPRI LATIFAN):

Sedikit ada tambahan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Kira-kira kendala saja sampaikan, Pak. Apa kendalanya?

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA (SEPRI LATIFAN):

Siap.

Kita sangat apresiasi rekomendasi dari Komisi II kepada Pemerintah terkait penyelesaian masalah non-ASN, itu sangat luar biasa untuk memastikan Teman-teman non-ASN yang sudah mengabdikan lebih dari lima tahun dan diangkat dan dipastikan menjadi ASN PPPK Desember 2024.

Tetapi yang tidak perlu kalah kita cermati, Pimpinan dan Bapak/Ibu semuanya, bagaimana mengawal implementasi tersebut. Bagaimana mengawal rekomendasi yang diberikan Bapak/Ibu Komisi II.

Itu realitanya, Pemerintah misalkan tadi Bapak Pimpinan menjelaskan semuanya itu atas arahan dari BKN. Itu sudah masuk dalam *database* BKN tanpa terkecuali dan juga *website*-nya bisa diakses.

Bapak/Ibu kebetulan FKHN baru bulan kemarin, kita audiensi dengan BKN. Data yang sudah masuk dalam *database* BKN pendataan 2022 itu tidak bisa ditambahkan. Itu enggak bisa ditambahkan, Pak. Data yang sudah masuk, jadi data non-ASN yang sudah masuk dalam *database* BKN Pak, itu tidak bisa ditambahkan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Begini begini, Pak. Kalau itu tidak bisa, serahkan kepada Komisi II, Pak.

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL FKHN INDONESIA (SEPRI LATIFAN):

Siap, siap.

Kita percayakan itu dan kita memohon di sini, kita memohon dan berharap dan menitipkan harapan ke Komisi II, ke Pimpinan dan Bapak/Ibu Komisi II, untuk betul-betul mengawal bagaimana proses kerja dari kementerian-kementerian terkait sehingga kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah bukan kebijakan yang merugikan tenaga non-ASN. Kita rasa ini teman-teman juga setuju dengan akan ini.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Iya, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Silakan, Pak Gaus.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Interupsi.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Kita santai saja, Pak. Kita bisa saut-sautan saja.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Iya, interupsi.

Saya interupsi.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Silakan, Pak Gaus.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Ya, apa yang sedang disampaikan oleh adinda dari forum FKHN, ini pernah juga saya ungkapkan Pak Ketua, pada kita RDP dengan Pak Menteri. Saya sangat paham betul apa yang beliau sampaikan.

Yang bisa dijamin oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian MenPANRB, itu adalah sebagaimana dikatakan tadi jumlah yang 2,3 juta. Yang 2,3 juta itu berdasarkan surat edaran dan datanya *ter-update* oleh Kementerian MenPANRB.

Saya dahulu turun ke lapangan salah satu di antaranya adalah dapil saya namanya Kabupaten Padang Pariaman. Karena sikap daripada BKD (Badan Kepegawaian Daerah), apa namanya sekarang saya enggak tahu, ada yang menghambat. Yang kata Ketua itu betul, yang disampaikan oleh Pimpinan saya juga benar.

Yang jadi persoalan adalah orang yang bekerja lima tahun secara terus-menerus, tetapi dia tidak termasuk pada *update* data. Padahal janji Pemerintah, dan itu selalu saya tuntut itu Ketua dan Ketua juga pernah menyampaikan sinyalemen, di luar 2,3 juta ini masih ada diduga jumlahnya yang tidak terdata itu adalah sebanyak 3 juta orang. Mungkin termasuk yang adinda sampaikan itu.

Jadi ketika itu memang ada dua tahapan, Ketua. Pertama, bagaimana menyelesaikan yang 2,3 juta menjadi ASN sesuai dengan surat edaran dari Kementerian MenPANRB yang sudah *ter-update* data. Itu solusi yang disampaikan dulu.

Kemudian bagaimana pula dengan orang-orang yang sebetulnya bekerja yang dikatakan tadi 10 tahun, 15 tahun, malah ada yang 20 tahun tetapi tidak termasuk pada *update* data?

Ini barangkali merupakan keputusan kita *nih* hari ini, Ketua. Artinya bagaimana kebijakan. Saya enggak bisa juga menyatakan ini prioritas tentu yang, yang *ter-update* data yang pertama dulu. Itu kita, keti, kan juga tidak boleh zalim karena memang ini yang Bapak-bapak yang tidak *ter-update* data karena dizalimi juga oleh orang-orang yang bekerja di kabupaten/kota, pegawai negerinya.

Kalau di Padang Pariaman itu adalah Kepala Dinas Pendidikannya yang tidak mau meng-*update* data untuk dilaporkan ke BKD sampai menjadi bagian daripada data yang terkumpul. Ini, saya tahu persis itu.

Oleh karena itu, ada dua persoalan pokok yang perlu kita bicarakan pada hari ini. Pertama adalah orang yang sudah *ter-update* data dan dia harus, tidak dapat tidak, sebelum Desember 2024 sudah harus menjadi ASN. Apakah dalam bentuk PNS ataupun PPPK.

Begitu, Ketua. Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Terima kasih, Pak Gaus.

F-P. NASDEM (KAMRAN MUCHTAR PODOMI, ST):

Ya, ya.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Masih ada, Pak?

Masih.

F-P. NASDEM (KAMRAN MUCHTAR PODOMI, ST):

Ya siap, Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Sebentar, Pak.

F-P. NASDEM (KAMRAN MUCHTAR PODOMI, ST):

Jadi langsung saja ini.

Soal PPPK ini kan karut-marutnya.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Sebentar, Pak Kamran. Sebentar, Pak.

F-P. NASDEM (KAMRAN MUCHTAR PODOMI, ST):

Ya?

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Sebentar, Pak.

(...):

Dari.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Sudah puas Pak, ya? Jawaban Pak Gaus sudah puas, ya?

(...):

Izin, izin, Pimpinan.

Bentar, sini, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Bapak Anggota juga?

(...):

Iya, ini khusus menyampaikan masalah KemenPANRB.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Bukan, Anggota bukan?

(...):

Bukan, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Nanti dahulu, Pak. Nanti Pak, ya

(...):

Siap, siap, siap.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Nanti, Pak. Sabar-sabar saja, Pak.

(...):

Siap, siap, siap.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Hidup harus penuh kesabaran.

(...):

Merdeka!

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Silakan.

F-P. NASDEM (KAMRAN MUCHTAR PODOMI, ST):

Iya, terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom,*

Anggota, dan seluruh Hadirin yang saya hormati,

Kalau kita bicara tentang PPPK dan lain-lain yang ada di daerah masalahnya banyak. Pelakunya bukan sendiri, Pak. Penguasa di daerah, sama Teman-teman juga kadang-kadang juga *kongkalikong* di bawah.

Waktu Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian PANRB, saya katakan, "Ada di daerah saya kerjanya di pasar tetapi dia terangkat sebagai pegawai negeri."

Kan ini zalim namanya. Orang sudah 20 tahun dia jadi honorer tetapi dia tidak bisa diangkat sebagai pegawai negeri karena dia tidak punya akses terhadap kekuasaan.

Nah, mental kita juga enggak boleh seperti itu karena pasti Bapak-bapak sekalian juga berhubungan dengan kekuasaan di bawah. Revolusi mental kita kan masalah di sisi ini. Sehingga apa? Ada begitu dia terangkat, pensiun, Pak Ketua. Ini yang kejadian di daerah kita di bawah dan yang merasakan ini pasti masyarakat kecil yang tidak punya akses pada kekuasaan.

Coba saya mau tanya, siapa yang punya akses dengan operator?

Pasti dia bisa mengubah ini Dapodik dan segala macam. Kuncinya ada di operator. *Nah*, ini yang harus kita kawal bersama-sama.

Soal data *up and down* Ketua, tergantung pilkada. Kalau ini nanti November pilkada, honorer akan tambah. Ini juga harus kita perhatikan karena kementerian ini mereka punya anggaran yang mereka harus proyeksikan sesuai dengan penerimaan PPPK dan ASN.

Data di Menpan itu, Pak Gaus, kalau kita lihat kemarin 2,3. Begitu dia ikut masih ada 1,7. Terus bagaimana yang 3 juta? Oleh sebab itu, kita jangan menjadi bagian daripada pemain untuk mempermainkan ini masyarakat di bawah yang tadinya masih ada 3 juta.

Nah, ini Pimpinan karena ini rumit, Pak. Masalah semua kita merindukan ini kan ingin jadi PPPK, ingin jadi ASN. *Nah*, kalau kita tidak potong ini sampai kapan ini persoalan dan dia akan selalu seperti ini karena ini lapangan pekerjaan. Selama negara ini tidak menyiapkan lapangan pekerjaan, maka kasus ini tidak akan pernah berhenti.

Makanya, Pak Gaus, saya enggak, tidak setuju kalau dia harus distop tahun sekian. *Ndak* bisa, Pak. Tidak seluruh pegawai negeri bisa bekerja di bawah, tidak seluruhnya. Justru honorer yang jadi pekerja di bawah.

Nah, ini. Jadi memang ini tidak mudah, Pimpinan, tetapi harus kita selesaikan sebagai bangsa. Masa Saudara-saudara kita puluhan tahun mengabdikan tiba-tiba orang lain hanya karena faktor tangan kekuasaan.

Mungkin itu sebagai pengawal kita karena memang rumit masalah ini.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Walaikumsalam.

Terima kasih, Pak Kamran.

F-P. GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Agung.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Pak Agung. Silakan, Pak.

F-P. GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Ini dari Fraksi Golongan Karya.

F-P. GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Silakan, Pak.

F-P. GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

**Pimpinan yang saya hormati,
Rekan-rekan Anggota Dewan, dan
Sahabat-sahabat tercinta yang saat ini sedang mengadakan apa yang jadi
harapan dan keinginan luhur,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita sekalian,

Om Swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Saya dari Fraksi Golkar menghargai kehadiran Ibu/Bapak semuanya di rumah rakyat ini. Memang di sinilah tempat Ibu/Bapak mengadu.

Persoalan pegawai pemerintah ASN, baik itu PNS maupun PPPK, ini memang sedang menjadi topik hangat dan itu menjadi tekad kami. Di periode ini, kami semaksimal mungkin untuk bagaimana mendesak Pemerintah agar Bapak/Ibu bisa dituntaskan kejelasannya, bisa dipastikan dan dinaikkan derajat kesejahteraannya dan juga bisa dipastikan statusnya.

Kemarin yang Pak Gaus sampaikan adalah hasil terakhir keputusan rapat ya yang ada di sini, di RDP di sini, dan bersama-sama dengan kementerian terkait. Memang ada sejumlah angka yang harus dituntaskan.

Tetapi yakin dan percayalah bahwa hasil pendataan baik itu yang masuk *database* ataupun yang belum. Saya tidak bilang tidak ya, yang sudah masuk ataupun yang belum. Saya harus sampaikan bahwa Pemerintah dan DPR, khususnya Komisi II ini, punya tekad yang sama agar bisa secepatnya menuntaskan kejelasan status Bapak/Ibu yang hadir di sini sebelum kokok ayam pagi.

Artinya apa? Kalau ini kita terjadi beda pendapat ada yang sudah masuk *database* ataupun belum, itu hanya bagian dari cara pandang Pemerintah. Kebetulan saya Komisi II yang ditugasi juga di Banggar.

Pemerintah dan kementerian/lembaga terkait pemangku kebijakan ini tentu punya cara pandang yang berbeda dengan kita. Pemerintah akan menetapkan kebijakannya sesuai dengan kriteria, syarat yang berlaku, dan juga kesiapan penganggaran.

Dari sisi APBN, kami kemarin rapat terakhir dengan BKN dan KemenPAN. Format APBN 2025 besok sudah harus mencerminkan kejelasan status Bapak/Ibu yang hadir di sini dan semua yang sudah bekerja mengabdikan pada Indonesia.

Lalu, kami juga menyampaikan beberapa persoalan Kawan-kawan tenaga kesehatan dan juga bidan. Ada sejumlah angka, ada sejumlah nama yang mereka sudah lolos. Ulangi, mereka sudah lulus ujian tetapi belum lolos.

Nah, ada ternyata beda cara pandang antara Kementerian Kesehatan.

Maaf Bu Rieke, saya juga sempat, apa, mengontak kementerian terkait.

Perbedaan cara pandang antara bidang profesi dan bidang pendidikan. Saya bilang apa pun cara pandang itu silakan kebijakan ada di tangan Pemerintah.

Tetapi persoalannya secara politis secara faktual, Teman-teman bidan yang ada di lapangan, ada di pelosok-pelosok, ada di daerah terpinggirkan, mereka profesi ataupun pendidikan semuanya bekerja membantu Pemerintah menolong persalinan, betul? Orang ber-, orang mau melahirkan tidak tanya, "Ibu bidan pendidikan apa Ibu bidan profesi?"

Tetapi ketika di kampung tidak ada tenaga yang menolong persalinan, maka dia punya hak menolong persalinan. Maka dia sudah mengabdikan pada republik ini.

Untuk itu, ada sejumlah angka, kalau tidak salah kawan-kawan kita 700 atau 600 sekian. Karena dia sudah lulus, wajib hukumnya bagi Pemerintah, untuk diangkat.

Pada bagian lain, beda cara pandang tadi yang Pak Gaus sampaikan dan juga Pemerintah. Kalau tidak salah dalam notulen rapat, nanti tolong dicek dengan kesekretariatan, Pemerintah berjanji.

Pertama akan menuntaskan angka yang sudah disepakati itu, tetapi bukan berarti Ibu/Bapak yang sudah keluar keringat mengabdikan pada merah putih kemudian tidak diperhatikan. Ini hanya masalah waktu kemudian fiskal yang ada di APBN.

Permintaan kami Bapak/Ibu, tetap sabar, ikhlas mengabdikan pada profesi masing-masing. Jangan salah, ini memang benar apa yang disampaikan Pak Kamran. Kadang mereka yang, yang, yang sudah PNS dan sebagainya,

mereka selalu melempar kepada Ibu/Bapak untuk menyelesaikan tugas-tugas itu, betul?

Tetapi pada bagian lain sabar, sabar, dan sabar. Jangan ketika dilempar begitu pekerjaan, terus Ibu bilang, "Noh, serahkan aja *tuh* yang PNS, yang sudah PPPK," jangan. Pengabdian ini saya yakin dengan penuh keikhlasan akan berbuah hikmah.

Saya akan mengawal untuk menyelesaikan semua pegawai yang sudah mengabdikan pada Republik Indonesia ini. Hanya masalah waktu. Satu permintaan saya, tetap ikhlas mengabdikan dan tolong dukung doanya.

Terima kasih dari saya Agung Widyantoro, Dapil Brebes, Tegal dan Kota Tegal. Tolong sampaikan sama Kawan-kawan kalau ada yang hadir ya *alhamdulillah*. Kalau enggak ada yang hadir, tolong diajak juga karena di sana bukan berarti tanpa persoalan, begitu.

Kemarin kami menerima pengaduan, kalau enggak salah ada 60 dari 600 sekian bidan pendidikan yang mereka sudah lulus tapi tidak lolos.

Melalui siaran langsung yang dilansir oleh Bu Rieke ini, saya titip salam bahwa kami sudah berjuang untuk Dapil kami dan juga teman-teman semuanya.

*Ashrun minallah wa fathun qarib,
Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om santi santi santi om.*

F-P. GOLKAR (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Terima kasih, Pak Agung.

F-P. GOLKAR (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Mau keluar, Pak?

F-P. GOLKAR (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Sedikit saran, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Silakan, Pak Bagus.

F-P. GOLKAR (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Siap. Terima kasih, Pimpinan.

Sedikit saran saya menyampaikan karena ini waktu sudah tak terasa sudah lewat 30 menit. Izin saran saya, kita mendengar masukan dan permasalahan dari masing-masing undangan yang kita kirim yang kemudian setelah itu seperti biasanya baru kita melakukan pendalaman.

Sekian saran, Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Terima kasih, Pak Bagus.

Jadi begini, Pak Bagus dan saya izin kepada Teman-teman Anggota, saya kira semua permasalahan sama ini, iya kan? Belum terdata di *database* ya, tidak bisa masuk ke *database*. Dari Kementeriannya juga dalam tanda petik "mempersulit," kan begitu ini Pak, iya kan? Regulasinya banyak, nomenklatur juga macam-macam, kita sudah tangkap ini Pak, sebenarnya.

Nah, yang perlu kita sebenarnya ini dari.

Dikurang dua.

Dari delapan ya forum ini, tolong Pak, kami dikasih berkasnya, ya. Diserahkan ke kami nanti berkasnya. *Nah*, berkas ini akan dikaji oleh Tenaga Ahli di Komisi II dan akan kami serahkan kepada kementerian dan Kepala BKN, ya.

Kita sama-sama berjuang, Pak. Walaupun kami sudah dipercayakan sebagai wakil rakyat, tetapi tetap Bapak sebagai *principal* kami itu, harus mengawal kami juga.

Kita berjuang bersama dengan catatan 24 Desember 2024 semua tenaga honorer, saya ulangi Pak, sudah harus diangkat menjadi paling sedikit PPPK. Ini, Pak.

Nanti kita buat satu kesimpulan dalam pertemuan ini supaya kami juga bisa bersurat resmi kepada kementerian-kementerian terkait.

Nanti untuk Kementerian Kesehatan ada Bu Rieke Diah Pitaloka di sini, ya. Ya beliau orator yang betul-betul terukur, Pak. Bukan asbun setahu saya.

Nah, untuk itu, kami persilakan Bu Rieke.

Izin? Mau, Pak Bagus? Mau bicara?

Silakan, sebelum ke Bu Rieke.

PERWAKILAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATA BAKTI INDONESIA:

Izin, Pimpinan.

Ini agak beda Pak, yang akan kami sampaikan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Sebentar, sebentar, Pak. Ada Pimpinan di sini, Pak.

Saya, saya, sudah catat Bapak nanti Pak di sini, ya?

PERWAKILAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATA BAKTI INDONESIA:

Siap.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Silakan, Pak Bagus.

F-P. GOLKAR (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Iya. Terima kasih, Pimpinan.

Sebenarnya saya *sih* ingin, ya walaupun masalahnya secara umum kita tahu, seperti apa yang Pimpinan sampaikan dan seperti kita sampaikan dan seperti kita tahu, tapi saya sebenarnya ingin mendengar lebih dalam keluh kesah dari rekan-rekan yang hadir karena permasalahan sudah tentunya sangat berbeda.

Contoh kami yang di Bali, ini ada perwakilan dari penyuluh bahasa Bali mempunyai permasalahan yang klasik sedikit, Pimpinan. Walaupun secara umumnya, mereka tidak masuk dalam postur PPPK.

Perlu kita mendengar masukan-masukan sehingga harapan saya, selesai harap, selesai rapat ini ada rekomendasi yang kita dari Komisi II lahirkan kepada Kementerian PANRB terkait dengan penyelesaian honorer.

Sebenarnya saya sangat tidak setuju pernyataan PANRB dalam ungkapan menyebut negara ini bukan negara honorer. Masalahnya bukan di situ. Yang pertama adalah tenaga, pengabdian, rekan-rekan kita yang sudah puluhan tahun bekerja di masing-masing instansi ini harus kita selesaikan dalam pengangkatan PPPK tanpa alasan apa pun.

Yang kedua adalah kita memberikan rekomendasi kepada Kementerian PANRB. Sebenarnya Kementerian PANRB ini sudah melanggar ketentuan Pasal 68 Undang-Undang ASN terkait dengan, dengan pelampauan batas penyelesaian ini. Namun, di dalam pelanggaran tersebut, PANRB memberikan dalih lain, ya, dalih lain dan ini sangat mengesampingkan asas keadilan bagi teman-teman yang honorer ini.

Dan satu hal lagi, Pimpinan. Rekomendasi yang saya sarankan. Toh juga Pemerintah menganggarkan sejumlah angka untuk membayar tenaga ini. Kenapa harus melalui pihak kedua, yaitu terkait pemberian hak kepada melalui *outsourcing*.

Berarti dengan kita memberikan *outsourcing*, berarti kita menyisihkan beberapa anggaran yang di mana anggaran ini sudah penuh dibayar oleh negara. Namun, pada hakikatnya tidak penuh diterima oleh pekerja itu sendiri. Ini sangat keluar dari asas keadilan.

Boleh atau saya setuju *outsourcing* ini diterapkan setelah honorer ini selesai, Pimpinan. Bilamana kabupaten/kota dan provinsi membutuhkan tenaga, bisa diangkat oleh *outsourcing*. Tapi jangan diterapkan pada honorer yang belum terangkat pada kesempatan ini.

Itu kira-kira rekomendasi kedua yang saya bisa sampaikan terkait RDPU ini dan saya memohon kepada Pimpinan dan kita Komisi II yang sudah tentunya sangat berkomitmen menyelesaikan di periode ini agar honorer ini harus selesai semua.

Itu kira-kira konkret, Pimpinan, yang bisa saya selesaikan, yang saya bisa sampaikan dengan harapan semua terselesaikan di tahun ini tanpa perkecualian.

Sekian, terima kasih.

Dan perlu diingat menurut saya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi atau negara. Pasal 23 ayat (1) di bidang anggaran sepenuhnya diberikan untuk kemakmuran rakyat.

Yang kedua adalah Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang saya bacakan, yaitu ayat (1)-nya, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Yang kedua, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Inilah menjadi dasar usulan saya sehingga terdapatnya keadilan pada tenaga-tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Provinsi Bali.

Sekian, terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Terima kasih, Pak Bagus Adhi Mahendra.

Silakan, Bu Rieke.

**ANGGOTA KOMISI VI/F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA INTAN
PURNAMASARI, S.S., M.Hum.):**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Walaikumsalam wabarakatuh.

**ANGGOTA KOMISI VI/F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA INTAN
PURNAMASARI, S.S., M.Hum.):**

Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiatu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu,

**Yang kami hormati Pimpinan, dan
Anggota DPR RI Komisi II,**

Beribu terima kasih, saya meskipun dari, bukan dari Komisi II tapi diperkenankan untuk mendampingi teman-teman yang bekerja di pemerintahan lintas sektor, khususnya tenaga kesehatan bidang yang mengadakan nasibnya.

Alhamdulillah, Bapak. Kami sangat senang bahwa ini terbuka juga untuk umum.

Ada beberapa persoalan tadi menimbang amanat konstitusi, mengingat amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, termasuk juga di pembukaan tentu saja selain di batang tubuh, bahwa tugas negara itu adalah melindungi seluruh rakyat dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Lalu setiap rakyat itu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, saya kira itu adalah sepakat dengan Anggota Komisi II

menjadi pegangan yuridis kita dan tentu mengingatkan pula bahwa Indonesia negara hukum sehingga seperti apa yang disampaikan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi II penting kiranya bahwa persoalan ini diletakkan dalam perspektif norma hukum, khususnya yang menyangkut tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu Undang-Undang ASN.

Dengan mengingat Undang-Undang ASN, khususnya tadi disampaikan oleh Pimpinan, Pasal 66 bahwa harus ada penyelesaian paling lambat 24 Desember 2024. Jadi beberapa bulan lagi saja.

Dan kebetulan kami juga pernah mendampingi waktu itu belum ada Undang-Undang ASN yang sangat luar biasa hasil perjuangan kita semua tentu saja, khususnya Komisi II. Kita pernah melakukan kebijakan afirmatif bagi para tenaga kesehatan untuk bukan PPPK, bahkan menjadi PNS di atas usia 35 tahun. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin asal pijakan kita adalah terutama konstitusi.

Ada beberapa turunan dari undang-undang, saya kira kita sama-sama memahami Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7. Ini juga mungkin kita bisa *sharing* dengan teman-teman yang hadir di sini bahwa ada hierarki peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar; kemudian
2. Tap MPR; kemudian
3. Undang-undang; lalu kemudian
4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang; lalu
5. Peraturan presiden, dan seterusnya.

Di dalam penjelasan Pasal 7 tersebut, hierarki peraturan perundang-undangan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya.

Sehingga dengan demikian, penting kiranya mohon dukungan karena saya sangat yakin, saya sangat percaya, dan saya sangat menghargai Bapak/Ibu di Komisi II lebih jauh memahami dari kami yang tidak di Komisi II terkait peraturan perundang-undangan menyangkut Aparatur Sipil Negara yang bekerja di pemerintahan di seluruh Indonesia.

Tadi disampaikan ada beberapa peraturan menteri, ada beberapa surat edaran. Apakah, bisa kiranya nanti mohon kami arahan dan bimbingan untuk sama-sama menganalisis, apakah peraturan termasuk Perda tingkat satu, Perda tingkat dua, Pergub, Perbup dan Perwalkot itu, apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan di atasnya? Termasuk peraturan dirjen, surat edaran dirjen, peraturan menteri, tetap tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya.

Saya ingin mengambil contoh, izin Pimpinan dan mohon dukungannya. Untuk khususnya tenaga kesehatan bidan, D4 pendidik ijazahnya. Pada tahun 2022, keluar Surat Edaran Dirjen untuk teknis rekrutmen mereka menjadi Aparatur Sipil Negara dengan status PPPK. Dbolehkan D4 pendidik ijazahnya

karena mereka pada hakikatnya seperti yang disampaikan oleh sahabat di Komisi II yang penting dilihat mereka bekerja di mana bukan ijazahnya.

Tapi 2023 muncul surat edaran bahwa mereka tidak boleh, tidak bisa mengikuti seleksi. Tetapi ketika mereka mengajukan prasyarat administrasi melalui *website* resmi BKN, resmi BKN, dengan meng-*upload* ijazah D4 pendidik, itu tidak ada masalah.

Kemudian, karena ada surat edaran di 2023, mereka meskipun telah lulus jumlahnya kurang lebih, mestinya ini juga BKN yang punya data, bukan kami yang mencari, bukan bidan yang mengumpulkan. Ada sekitar 690 orang sudah lulus. Ini Teman-teman yang profesi lain, ini sudah lulus ujian saja, enggak dikeluarkan SK-nya.

Nah, kemudian di 2024 keluar surat edaran lagi bahwa tidak ada masalah dengan ijazah D4 pendidik.

Kok saya jadi *oneng*-nya kumat, Pimpinan.

Ya, aturan ini kok bisa berubah-ubah, ya. Seolah-olah tidak menyangkut, mohon maaf, profesi ini dan mereka yang bekerja di garda terdepan pelayanan publik, bukan hanya menyangkut mereka yang bekerja tetapi menyangkut masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Sungguh kami mengapresiasi teman-teman Komisi II sangat memberikan dukungan terhadap kasus bidan ini.

***Nah*, Pimpinan dan juga
Anggota, dan
Hadirin yang saya hormati,**

Singkat kata, betul seperti Pimpinan tadi katakan, kita membuat *database*. Nanti kita mungkin bisa *sharing* bagaimana *database* itu diberikan ke Komisi II begitu, lengkap dengan masa kerjanya, lengkap dengan gajinya.

Jadi, teman-teman Komisi II yang sudah luar biasa ini, mereka tidak mungkin menelusuri data BKN meskipun harusnya BKN sendiri yang memberikan.

Izin, Pimpinan. Ini ada sekitar 690 orang. Kemarin terakhir dikatakan, "Yang penting mereka sudah bekerja lebih dari dua tahun." Ini ada yang sudah 16 tahun, ada yang 14 tahun, dan mereka ujian dan mereka lulus tes di 2023.

Oleh karena itu, dalam forum ini dengan segala kerendahan hati kami dan keterbatasan kami terhadap pemahaman norma yuridis tentang Aparatur Sipil Negara, saya setidaknya, saya mengindikasikan adanya cacat hukum di dalam keluarnya Surat Edaran Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan. Dan oleh karena itu, batal demi hukum sesungguhnya karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan terindikasi kuat, menurut kami ini ada maladministrasi.

Sama seperti yang terjadi pada sahabat-sahabat yang lain, Pimpinan dan Anggota. Apa yang mereka alami sesungguhnya terindikasi kuat cacat administrasi.

Jangan karena mereka, jangan karena mereka sedang berkuasa, terindikasi cacat administrasi, termasuk yang disampaikan sahabat tadi tentang kondisi di daerah. Saya kira ketika pemerintahan terindikasi kuat cacat administrasi, terindikasi kuat melampaui peraturan perundang-undangan padahal pemerintahan ini harus dijalankan berdasarkan norma hukum, dalam pandangan konstitusional kami, maka seluruh aturan yang bertentangan itu kiranya batal.

Dan kemudian mereka yang telah mengabdikan diri kepada negara, para pelayan publik apalagi sampai masuk skema *outsourcing*, itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, saya kira Pak, karena tidak semua pekerjaan bisa di *outsourcing*-kan.

Oleh karena itu, di dalam forum ini izinkan kami memberikan data kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II tentang, setidaknya ini bisa menjadi langkah awal kita. Ini orang sudah lulus ujian masalahnya. Mohon dukungannya untuk disampaikan. Mereka yang telah lulus ya harus diangkat, keluarkan SK dan NIP-nya. Kalau yang sudah lulus saja tidak diangkat, bagaimana mereka yang lagi *ngurusin* data. Saya kira ini langkah konkret.

Sekali lagi, terima kasih Pimpinan dan mohon maaf kalau saya harus mengatakan ketika pemerintahan terindikasi kuat melakukan maladministrasi dan cacat hukum prosedural, maka rakyat jangan dikorbankan.

Kalau, kalau urusannya APBN tadi sahabat-sahabat yang di Banggar sudah mengatakan itu akan dialokasikan Pimpinan, saya yakin APBN itu kalau disusun berbasis data yang akurat, cukup.

Masa buat yang korban judi *online* aja mau dikasih. Ini orang kerja, loh. Asal jangan pada jadi main judi *online*, ya.

Terima kasih, Pimpinan. Mohon maaf terlalu panjang.

Sahabat-sahabatku terkasih di Komisi II, terima kasih sekali untuk kesempatannya. Mohon maaf saya berani datang ke komisi lain tapi saya kira karena mereka ini bekerja di seluruh provinsi di daerah pemilihan kita juga semua.

Mohon maaf lahir batin dan selamat Idul Adha juga bagi yang merayakan.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq,

Izin saya berikan data ini kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II untuk disampaikan kepada KemenPAN dan juga BKN bahwa ini data konkret orang kerja di lapangan. vaksin, imunisasi, melahirkan.

Betul Bapak, kita enggak tahu loh. Kalau enggak ada bidan, mungkin tidak ada Pimpinan Komisi II yang bernama Junimart Girsang, ya. Dan kita semua, saya juga dilahirkan sama Bu Bidan, namanya Bu Bidan Oom di Garut.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Walaikumsalam wabarakatuh.

ANGGOTA KOMISI VI/F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA INTAN PURNAMASARI, S.S., M.Hum.):

Terima kasih, Indonesia.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Terima kasih, Ibu Dr. Rieke Diah Pitaloka.

Beliau bukan Anggota Komisi II, Bapak/Ibu sekalian.

Ya, beliau Komisi.

ANGGOTA KOMISI VI/F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA INTAN PURNAMASARI, S.S., M.Hum.):

VI.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

VI. Komisi tentang kekayaan-kekayaan negara, Pak.

ANGGOTA KOMISI VI/F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA INTAN PURNAMASARI, S.S., M.Hum.):

Jadi saya tahu tentang uang.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Di sini tentang komisi, di sini komisi air mata di sini, Pak. Kalau Beliau komisi mata air. Jadi, kalau Beliau sudah berani datang ke komisi air mata, luar biasa, Pak.

Terima kasih, Bu Rieke.

Bapak/Ibu,

Kami tidak membatasi tetapi ketika ada hal lain yang mungkin ya harus kami ketahui, silakan nanti. Tapi kalau, kalau secara umum, ya itu sudah memang kami ketahui, *ndak* perlu Pak, ya.

Sebelum ke sana, silakan, Pak.

**KETUA FORUM GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN INDONESIA
(ABRAHAM PELLOKILA):**

Izin, Pimpinan. Saya dari Forum Guru Agama Kristen.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Silakan, Pak.

PERWAKILAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATA BAKTI INDONESIA:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastiastu,

**Saya, yang saya hormati Bapak Pimpinan, beserta
Anggota Dewan yang kami sayangi di Komisi II ini,**

Dalam kesempatan ini, benar Pak yang akan kami sampaikan memang agak berbeda. Berbedanya saya akan menyampaikan permasalahan yang pertama yaitu tentang KepmenPANRB Nomor 158/2023 dan KepmenPANRB Nomor 11 Tahun 2024.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Iya. Izin, Pak. Dari mana, Pak?

PERWAKILAN SOLIDARITAS WIYATA BAKTI NASIONAL INDONESIA:

Saya, perkenalkan kami perwakilan dari Solidaritas Wiyata Bakti Nasional Indonesia yang di dalamnya tergabung tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini adalah penjaga, terdiri dari tata usaha sekolah, operator sekolah, perpustakaan sekolah, laboratorium sekolah, penjaga, satpam, dan lain-lain, Pak. Artinya di sini masih di bidang pendidikan. Kalau di Dirjen Pendidikan itu bagian guru dan tenaga kependidikan.

**Bapak Pimpinan, beserta
Anggota Dewan yang kami hormati,**

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Sebentar, sebentar, Pak.

Bapak dari mana?

Forum Guru Prioritas Pertama Negeri?

PERWAKILAN SOLIDARITAS WIYATA BAKTI NASIONAL INDONESIA:

Bukan, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Dari mana, Pak?

PERWAKILAN SOLIDARITAS WIYATA BAKTI NASIONAL INDONESIA:

SNWI. SNWI. Solidaritas Wiyata Bakti Nasional Indonesia.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Oh, nomor 5. Solidaritas Wiyata Bakti Nasional Indonesia. Tadi saya
panggil enggak ada tadi, Pak.

Telat Pak, ya?

PERWAKILAN SOLIDARITAS WIYATA BAKTI NASIONAL INDONESIA:

Iya ada telat, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Oh iya. Kami menunggu tadi, Pak.

PERWAKILAN SOLIDARITAS WIYATA BAKTI NASIONAL INDONESIA:

Terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Iya. Silakan, Pak.

PERWAKILAN SOLIDARITAS WIYATA BAKTI NASIONAL INDONESIA:

Saya lanjutkan.

Kenapa saya menyampaikan masalah dua ini? Karena dua ini memang setelah kami pelajari Pak, dulu kami sudah menyampaikan permasalahan di Komisi X, karena komisi X ini kan mitranya ke Kemendikbudristek. Dan permasalahan tendik ini baru muncul setelah hampir separuhnya guru terselesaikan oleh Komisi II tentunya, kebijakan Komisi II.

Dua tahun yang lalu tepat di bulan November, ini sudah tersampaikan dan dapat respons yang baik, tetapi pada saat ini memang di penuntasan tenaga honorer secara nasional di tahun 2024 ini, tenaga Tendik yang saya sebutkan tadi adalah operator sekolah, penjaga sekolah, pustakawan sekolah, laboratorium sekolah, tata usaha sekolah di PermenPAN 158 tentang Jabatan Fungsional, itu sudah diubah menjadi KemenPAN Nomor 11 Tahun 2024, ini belum terakomodir.

Nah, sementara mereka posisinya sama dengan tenaga pendidik atau guru yang memang mereka bekerja di bawah atap sekolah dan ini merupakan sebuah jantungnya sekolah. Karena tenaga operator ini adalah seorang pekerja yang memang mengurus tentang data-data guru, data-data siswa, data-data tentang kepangkatan guru, dan lain-lain.

Nah, termasuk Dapodik yang guru itu sendiri, mereka yang *ngurusinnya*. Yang mereka masuk guru itu yang masuk Dapodik di BKN, di BKN di KemenPANRB itu termasuk juga mungkin ada kaitannya dengan *database* itu, mereka yang *ngurusinnya*.

Nah, tetapi mereka ini belum tersentuh karena antara Komisi II dengan KemenPAN, maksud saya, antara Komisi II dengan Kemendikbudristek barangkali belum ada *link* pembicaraan yang khusus Pak, Pak Pimpinan.

Nah, ini mohon kiranya di dalam kesempatan ini tenaga tendik ini di dalam Permen, KemenPAN Nomor 11 Tahun 2024 ini jabatan fungsionalnya masih dikategorikan teknis, Pak. Sementara teknis itu, maksudnya teknis itu adalah seorang pekerja yang mengabdikan diri di kantor-kantor, di kantor-kantor Pemda, di kantor-kantor kelurahan, di kantor-kantor ya di luar kependidikan. *Nah*, sementara mereka masih masuk dikategorikan teknis.

Kalau mau jelasnya bahwa yang dikatakan teknis itu namanya pekerja pustakawan, itu bukan pustakawan sekolah tetapi Pusda (Pustaka Daerah). Yang dikatakan Laboran, itu dalam teknis itu adalah pekerja yang bekerja di Dinas Kesehatan. Sementara ini, spesifiknya adalah yang bekerja di sekolah.

Nah, ini yang saya katakan bahwa dalam kesempatan ini kami sangat beruntung dan bersyukur sekali ketemu Pak Pimpinan beserta Anggota Dewan lainnya karena di sini memang tempatnya mengadu dan ini sudah lama diperjuangkan dari dua tahun yang lalu.

Tetapi pada akhirnya dalam saat-saat ataupun detik-detik penuntasan ASN, PPPK di tahun 2024 ini, tenaga tendik sampai saat ini belum mempunyai kesempatan untuk mendapatkan formasi. Formasi enggak ada sama sekali Pak, malah disuruh itu.

Nah, ini barangkali dalam kesempatan ini, Pak, kami akan menyerahkan daftar inventaris masalah yang saat ini sudah kami persiapkan. Pada suatu saatnya nanti kalau memang ketemu MenPAN, ya kami minta tolong sampaikan.

Yang kedua, harapan kami antara kebijakan MenPAN dan Kemendikbudristek serta Komisi X itu menyatu, Pak, itu. Jadi enggak miskomunikasi. Sehingga kebijakan MenPAN, suara dari Komisi X khusus bagian pendidikan, kalau ini masuk dulu permasalahannya dua tahun lalu barangkali tenaga tendik ini akan terakomodir.

Jumlahnya kalau ditanya, Pak, ini jumlah sekolah di Indonesia ini kan hampir 436.000, Pak. Jadi kalau kita kalikan empat saja dalam satu sekolah itu hampir satu juta juga, Pak. Tentu satu juta ini tidak akan terakomodir semuanya, ya minimal kembali lagi ke afirmasi masa kerja dan usia. Tetap kita mengacu kepada peraturan yang sudah dirancang oleh Komisi II khususnya dalam penuntasan tenaga honorer di Indonesia ini.

Barangkali itu, Pak Pimpinan, yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari yang bersangkutan.

Assalamualaikum.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Silakan, Pak. Berkasnya, Pak.

Sudah cukup saja, Bu. Cukup, Bu. Berkasnya saja kasih ke sini, Bu.

KETUA FORUM HONORER TENDIK (RENNY):

Maaf, Pak. Izin, Pak. Saya Ketua Forum yang memang honorer Tendik langsung, Pak.

Izin menyampaikan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Begini, begini, Bu. Tendik ini saya sudah dapat dari tiga provinsi. Kalau mau jelas, buka Youtube Komisi II. Saya sudah pernah bicara tentang Tendik di sana. Bagaimana peranan Tendik ini sesungguhnya.

Tendik ini ya sesungguhnya bisa menggantikan guru, Bu, ya. Ketika guru tidak hadir, maka Tendiknya yang jadi guru, iya kan?

KETUA FORUM HONORER TENDIK (RENNY):

Ini yang bikin, iya, Pak. Ini yang bikin.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Nah, kedua, data siswa juga menjadi tanggung jawab Tendik, kan begitu. Termasuk tadi Dapodik itu, yang *ngurusin* Dapodik para guru adalah para Tendik.

Ini saya sudah sampaikan kepada Saudara Menteri dan Kepala BKN supaya di, apa namanya, disikapi secara serius dan ini menjadi bagian dari honorer yang harus diperjuangkan.

Nah, oleh karena itu, tolong, Pak, berkasnya kasih ke sini.

KETUA FORUM HONORER TENDIK (RENNY):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Supaya nanti dalam rapat kementerian dan Kepala BKN, kami serahkan itu, Pak, ya?

Ya, Bu, ya?

Jadi cukup, cukup satu-satu orang saja, Pak.

Ini sudah saya mau ketok lagi nih mau perpanjang setengah jam.

KETUA FORUM HONORER TENDIK (RENNY):

Ini karena, Pak, dalam portal SSACN, teman kita tahun kemarin itu ikut dalam sudah mendaftar dan sudah resum, Pak. Tetapi pada saat pengumuman, TMS (Tidak Memenuhi Syarat) karena pengalaman kerja yang tidak linier. Kasus tahun 2023, ada tender ikut melamar sebagai tenaga teknis penyuluh BKK, BKKBN kualifikasi.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ibu, saya begini, Bu. Saya potong, Bu.

Ya saya sudah sampaikan di awal, mungkin tadi Ibu telat ya dengan Pak, apa, Pak Ketuanya. Ya ketika seorang tenaga honorer, mau Tendik, mau OB, mau *driver*, lima tahun berturut-turut tanpa terputus menjadi honorer maka dia wajib diangkat menjadi PPPK.

Nah, kalau tadi tendik itu belum lima tahun, ya kita enggak bisa campuri juga, harus tes. Tetapi ketika sudah lima tahun berturut-turut tanpa terputus, silakan kasih ke kami berkasnya, Bu. Jadi kan kita harus singkat-singkat aja ini.

Ya, Bu, ya?

KETUA FORUM HONORER TENDIK (RENNY):

Siap, Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Silakan, Pak. Mana berkasnya?

Matikan halo-halonya, Pak.

KETUA FORUM GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN INDONESIA (ABRAHAM PELLOKILA):

Izin, Ketua.

KETUA FORUM PENYULUH NUSANTARA (NI KETUT ADRIYANI):

Izin, izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya. Sebentar, Pak, sebentar.

Sambil berjalan kita perpanjang 30 menit paling lama, ya?

KETUA FORUM PENYULUH NUSANTARA (NI KETUT ADRIYANI):

Iya, siap.

KETUA FORUM GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN INDONESIA (ABRAHAM PELLOKILA):

Izin, Ketua. Dua menit saja, Ketua.

KETUA FORUM PENYULUH NUSANTARA (NI KETUT ADRIYANI):

Izin, ya.

(...):

Dari sini dulu.

ANGGOTA KOMISI VI/F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA INTAN PURNAMASARI, S.S., M.Hum.):

Jangan terlalu panjang, kasihan ini.

(...):

Iya, kan sesuai urutannya.

(...):

Ini bicara kaya.

(...):

Iya, tadi sesuai urutan.

(...):

Iya, iya. Itu sudah.

ANGGOTA KOMISI VI/F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA INTAN PURNAMASARI, S.S., M.Hum.):

Nanti *ditemenin* Ebo. Aku *nyerahin* nanti bareng sama Ebo.

(...):

Urutannya di atas tadi.

(...):

Enggak kondusif jadinya.

KETUA FORUM GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN INDONESIA (ABRAHAM PELLOKILA):

Izin, Pimpinan.

KETUA FORUM PENYULUH NUSANTARA (NI KETUT ADRIYANI):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Yang dari Bali tadi mana?

KOORDINATOR PAIKATEN PENYULUH BAHASA BALI (I Wayan Suarmaja, S.Pd.B.) :

Izin.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Silakan.

KOORDINATOR PAIKATEN PENYULUH BAHASA BALI (I Wayan Suarmaja, S.Pd.B.) :

Izin, Pimpinan.

Perkenalkan saya Suarmaja dari Koordinator Paikatan Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali.

Izin.

**Pimpinan,
Bapak/Ibu, dan
Anggota Komisi II yang kami hormati,**

Mohon izin, kawan-kawan yang hadir di sini semangatnya sama dengan kami juga yang dari Bali untuk segera diangkat untuk menjadi PPPK ataupun ASN, PNS seperti itu.

Jadi, kami dari Bali yang berbeda itu adalah kami penyuluh bahasa Bali, hanya ada di Bali. Sedangkan teman-teman yang lain itu ada secara nasional, seperti itu.

Nah, sesuai dengan pendataan, kami yang terdata di BKN belum juga bisa diangkat. Teman-teman yang sudah lulus juga tidak diangkat, apalagi yang baru akan mendata, seperti itu.

Jadi, Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Bali sudah menyusun untuk formasi yang bisa diisi oleh penyuluh bahasa Bali. Di KepmenPAN 11, sebelum KepmenPAN 173 Tahun 2023, 2024, itu ada penyuluh bahasa dengan jabatan yang bisa diisi CPNS dan PPPK.

Sedangkan di KepmenPAN terbaru 173 Tahun 2024, terdapat sebaran informasi penyuluh bahasa tersebut berubah hanya bisa diisi dengan CPNS sehingga Pemerintah Daerah mengulang lagi untuk pengusulannya. Sehingga kami di penyuluh bahasa Bali tidak terakomodir di dalam KepmenPAN yang dijadikan pedoman tersebut.

Jadi intinya, kehadiran kami di sini agar Komisi II memberikan rekomendasi kepada MenPANRB agar kami, meskipun kami hanya ada di daerah khususnya di Bali, mungkin Teman-teman bahasa Sunda, bahasa Jawa dan lain sebagainya, ke depan agar juga terakomodir di dalam penyelesaian non-ASN di tahun 2024 ini.

Secara data BKN, *database* BKN, kami sudah terdaftar di *database* BKN melalui penyuluh bahasa tetapi di KepmenPAN 173 yang dijadikan pedoman untuk pengusulan formasi tahun ini, itu hanya bisa diisi melalui jalur CPNS.

Demikian, Pimpinan. Singkat saja. Besar harapan kami.

Kami dari Bali datang 16 orang dan 632 orang lagi di daerah menunggu hasil dari perjalanan kami ke gedung rakyat ini.

Terima kasih.

Selamat siang.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Terima kasih dari Penyuluh Ikaten ya?

KOORDINATOR PAIKATEN PENYULUH BAHASA BALI (I Wayan Suarmaja, S.Pd.B.) :

Paikaten.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Paikatan.

KOORDINATOR PAIKATEN PENYULUH BAHASA BALI (I Wayan Suarmaja, S.Pd.B.) :

Paikaten itu forum atau wadah. Bahasa Balinya *paikaten*, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Paguyuban begitu, ya?

KOORDINATOR PAIKATEN PENYULUH BAHASA BALI (I Wayan Suarmaja, S.Pd.B.) :

Iya, paguyuban.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Ya, terima kasih.

Silakan.

(...):

Izin, Pimpinan.

(...):

Izin, Pimpinan. Saya.

(...):

Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Yang spesifik enggak, Pak? Spesifik enggak?

**KETUA FORUM GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN INDONESIA
(ABRAHAM PELLOKILA):**

Guru agama Kristen.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Silakan. Bapak dulu.

Dua menit, Pak, ya. Dua menit.

**KETUA FORUM GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN INDONESIA
(ABRAHAM PELLOKILA):**

Iya, saya dari Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia. Saya Abraham Pellokila.

Yang pertama bahwa kalau teman-teman masih ada formasinya, kalau kami tidak ada formasinya sama sekali, Pak. Saya contohkan Jawa Barat itu kosong, Pak, untuk guru Pendidikan Agama Kristen. Banten sampai hari ini gurunya semua yang agama Kristen itu, Pak, semua *volunteer* tanpa gaji, Pak.

Satu daerah di Cianjur, daerah Kristen itu, anak-anaknya 100% hampir 90, 90 sampai 100% Kristen tidak diizinkan guru agama yang beragama Kristen ataupun ASN beragama Kristen untuk mengajar. Bali tidak pernah mengajukan

formasi untuk guru pendidikan Agama Kristen, Pak. Dan banyak daerah, Pekanbaru juga demikian.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Sebentar, sebentar, Pak.

Ada suratnya enggak tidak mengizinkan?

KETUA FORUM GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN INDONESIA (ABRAHAM PELLOKILA):

Itu kan pengajuannya kan dari Pemda, Pak, formasi. *Nah*, mereka tidak buka formasi. Tidak buka formasi dari 21, 22, 23, sampai hari ini.

Dan di DKI Jakarta ada 45 guru yang sudah lulus tapi tanpa penempatan. Padahal mereka sudah jadi guru di tiap-tiap sekolah. Dan kami merasa bahwa begini, Pak. Jangan sampai gereja itu banyak mengalami persekusi, jangan sampai pendidikan juga begitu, Pak. Ini pendidikan agama, ini belum *omong* tentang yang Katolik, yang Buddha, dan Hindu dan penghayat kepercayaan.

Nah, karena itu, seperti Jawa Tengah kemudian Jogja, Jawa Timur, dan sebagainya. Kami melihat bahwa terjadi hal-hal yang tidak begitunya, tidak apa ya, seperti ada penahanan atau pembatasan di provinsi-provinsi tertentu.

Saya kasih contoh Depok itu, Pak. Depok sampai hari ini satu formasi pun tidak dimunculkan. Itu orang Batak banyak itu di sana, Pak. Bekasi 1500 formasi kemarin itu, tidak satu pun orang Kristen, Pak, guru agama Kristen, Pak. Tetapi di situ kan orang Batak kebanyakan, Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Maksudnya begini, Pak. Maksudnya guru agama Kristen itu.

KETUA FORUM GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN INDONESIA (ABRAHAM PELLOKILA):

Tidak ada dimunculkan formasi untuk masuk.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Sementara formasi ada?

KETUA FORUM GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN INDONESIA (ABRAHAM PELLOKILA):

Formasi ada. Buat PAI 1500 Bekasi, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Formasi ada, tetapi tidak dimunculkan?

**KETUA FORUM GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN INDONESIA
(ABRAHAM PELLOKILA):**

Tapi PAK pun tidak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Sementara itu dibutuhkan?

**KETUA FORUM GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN INDONESIA
(ABRAHAM PELLOKILA):**

Sangat butuh, Pak. Bagaimana Gereja HKBP di sana banyak-banyak. Mahasiswa Kristen itu banyak di sana, Pak.

Sehingga begini. Maksud kami bahwa ini bisa disampaikan ke KemenPANRB untuk mendorong Pemerintah Daerah agar menaruh perhatian yang sama karena saya pikir bahwa jangan sampai di bidang pendidikan terjadi hal-hal seperti begini.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Jadi begini, Pak, begini. Saya harus luruskan.

Jadi jangan melulu kita fokus ke KemenPANRB, Pak. Ini menyangkut lintas K/L, Pak, kementerian/lembaga. *Nah*, kalau guru agama itu saya kira Kementerian Agama. *Nah*, kalau Bapak sudah bikin surat ke Kementerian Agama, tolong suratnya ke kami, Pak.

**KETUA FORUM GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN INDONESIA
(ABRAHAM PELLOKILA):**

Izin, Pak.

Saya sudah, kami sudah ke Komisi VIII, Komisi X sudah.

Jadi begini, Pak. Untuk formasi PPPK itu domainnya Pemerintah Daerah, bukan Kementerian Agama lagi. Kementerian Agama sampai hari ini cuma mengurus tentang sertifikasinya, PPG-nya, sertifikasinya. Selain itu, semua sudah ada di bawah Kementerian Pendidikan yaitu di dinas atau di

Sudin dan sebagainya. Jadi untuk pengangkatan, untuk formasi ini diajukan oleh BKD Provinsi, Pak, atau kota ataupun kabupaten.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Nah, yang mempersulit BKD?

KETUA FORUM GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN INDONESIA (ABRAHAM PELLOKILA):

Ya kita tidak tahu siapa yang mempersulit, tapi yang jelas bahwa tidak dibuka formasinya.

Banten itu, Pak, sampai hari ini, Pak. Saya kemarin ketemu sama karena mereka persoalannya begitu, pengawasnya datang kita *ngomong*, itu hampir semua sekolah yang ada anak-anak Kristennya itu, Pak. Guru terpaksa dari luar datang *volunteer* tanpa gaji, Pak. Karena mau supaya begini, bahwa anak-anak Kristen situ tetap ada pendidikan agamanya.

Karena kalau kita omong pendidikan agama semenjak tahun 2003, ya, kesepakatan bahwa minimal 15 anak dalam satu sekolah harus ada guru agama dengan sesuai dengan agamanya berarti sudah wajib Pemerintah menghadirkan guru. Permendiknasnya juga demikian, ada berbagai Pergub atau Perda juga demikian.

Nah, karena itu, kami mendorong agar Komisi II mendorong Perlemen PANRB dan kemudian Kemendagri untuk menyampaikan kepada beberapa daerah atau provinsi ini khususnya Jawa Barat, Banten, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, kemudian Pekanbaru, dan beberapa daerah lagi, Padang. Dan kami berharap bahwa kehadiran pendidikan di Indonesia itu bagi semua golongan masyarakat, tidak boleh pandang bulu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya. Iya, begini, Pak. Supaya kami punya dasar, tolong *bikin* surat resmi ke Komisi II.

KETUA FORUM GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN INDONESIA (ABRAHAM PELLOKILA):

Baik. Siap, Pak Ketua.

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Karena Kemendikbud bukan mitra Komisi II, iya kan? Kemenkes juga bukan mitra Komisi II. Mitra kami hanya Kemendagri dan MenPANRB, BKN.

Tolong bikin surat resmi, Pak.

**KETUA FORUM GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN INDONESIA
(ABRAHAM PELLOKILA):**

Baik, baik.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Biar nanti kami bisa tindak lanjuti.

**KETUA FORUM GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN INDONESIA
(ABRAHAM PELLOKILA):**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Masih ada?

PERWAKILAN ALIANSI HONOR NASIONAL:

Oke. Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Siapa ini?

PERWAKILAN ALIANSI HONOR NASIONAL:

Saya di atas, Pimpinan.

Beda dengan apa yang disampaikan Pimpinan, izin.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Bapak dari mana?

PERWAKILAN ALIANSI HONOR NASIONAL:

Saya dari Aliansi Honor Nasional, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Apa?

PERWAKILAN ALIANSI HONOR NASIONAL:

Izin. Pak Ketum, silakan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Dari mana, dari mana, Pak?

PERWAKILAN ALIANSI HONOR NASIONAL:

Aliansi honor nasional Pak Ketum, Pak Pimpinan. AHN.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Tadi saya panggil, ada dari aliansi enggak di sini?

PERWAKILAN ALIANSI HONOR NASIONAL:

Iya. Ada, ada.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Ini ada di sini, Pak.

PERWAKILAN ALIANSI HONOR NASIONAL:

Ada. Itu Pak Ketum saya di depan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Iya, ada di sini.

Sabar, Pak. Sabar, Pak.

Silakan, Pak.

Coba operatornya ini.

PERWAKILAN ALIANSI HONOR NASIONAL:

Pak Ketum, ayo silakan.

KETUA FORUM PENYULUH NUSANTARA (NI KETUT ADRIYANI):

Cek, halo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Walaikumsalam.

KETUA FORUM PENYULUH NUSANTARA (NI KETUT ADRIYANI):

Kami dari Forum Penyuluh Nusantara yang tergabung dalam penyuluh KB se-Indonesia, Pak. Kami mitranya bidan, *nih*. Kalau bidan melahirkan kami yang mengatur kelahiran dan kependudukannya, mengendalikan juga.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Dari mana tadi, Pak?

Dari forum?

KETUA FORUM PENYULUH NUSANTARA (NI KETUT ADRIYANI):

Forum Penyuluh Nusantara.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Oh nomor sembilan, ya?

KETUA FORUM PENYULUH NUSANTARA (NI KETUT ADRIYANI):

Iya nomor sembilan, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Silakan, Pak. Singkat saja, Pak.

KETUA FORUM PENYULUH NUSANTARA (NI KETUT ADRIYANI):

Singkat saja.

Intinya kami, BKN sudah membuka peluang PPPK, *alhamdulillah*. Cuma untuk 2024 ini kayaknya kita enggak dibuka, Pak, begitu loh. Mohon kepada

untuk Komisi II agar nanti untuk 2024 ini dibuka lagi untuk formasi untuk, karena kawan-kawan banyak yang masih belum terakomodir, itu yang pertama.

Yang kedua kita tidak terdata di BKN, Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Sebentar, Pak. Yang dibuka apanya?

KETUA FORUM PENYULUH NUSANTARA (NI KETUT ADRIYANI):

Formasi PPPK, Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

PPPK?

KETUA FORUM PENYULUH NUSANTARA (NI KETUT ADRIYANI):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Kenapa harus 2024 Pak, dibuka lagi? Sekarang saja selesaikan, Pak, semua datanya karena 24 Desember.

KETUA FORUM PENYULUH NUSANTARA (NI KETUT ADRIYANI):

Iya, formasinya belum ada, Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Bapak, masukkan ke Komisi II.

KETUA FORUM PENYULUH NUSANTARA (NI KETUT ADRIYANI):

Iya, siap.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Bapak masuk ke *database*, hasilnya itu kasih Komisi II. Ketika kami rapat dengan kementerian dan BKN, akan kami serahkan itu, Pak.

KETUA FORUM PENYULUH NUSANTARA (NI KETUT ADRIYANI):

Oh, siap.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Caranya begitu, Pak.

KETUA FORUM PENYULUH NUSANTARA (NI KETUT ADRIYANI):

Oh data, *database* yang akan kami susun ke seluruh Indonesia dan kami serahkan kepada Komisi II.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Iya begitu, Pak. Ya nanti Pak Gaus akan sampaikan itu atau Pak, Pak Bagus nanti, atau Pak Agung.

Paham, ya?

KETUA FORUM PENYULUH NUSANTARA (NI KETUT ADRIYANI):

Cuma regulasi yang ada di sekarang ini kan harus berdasarkan CAT juga, Pak, ya.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Begini, Pak. Ini kan saya jadi mengulang ini. Jadi ujian ulangan kita, Pak.

Saya dari awal sampaikan, ketika seorang tenaga honorer lima tahun berturut-turut tidak terputus, maka dia wajib diangkat menjadi PPPK, Pak.

KETUA FORUM PENYULUH NUSANTARA (NI KETUT ADRIYANI):

Iya.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Iya kan? Daftarkanlah itu melalui *database*.

KETUA FORUM PENYULUH NUSANTARA (NI KETUT ADRIYANI):

Oke, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Walaupun kadang-kadang dipersulit di Pemkab, di Pemkot, ya mereka tidak, tidak memberikan *link* ke sana.

KETUA FORUM PENYULUH NUSANTARA (NI KETUT ADRIYANI):

Iya betul.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Kita sudah paham begitu-begitu, Pak.

Nah, daftarkan itu dan hasil pendaftaran kasih ke kami, Pak.

KETUA FORUM PENYULUH NUSANTARA (NI KETUT ADRIYANI):

Iya, Pak. Kita sudah buat ini, Pak, datanya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Begitu. Nanti.

Silakan silakan sini, Pak. Serahkan sini, Pak, sekarang biar cepat.

(PENYERAHAN DOKUMEN DARI KETUA FORUM PENYULUH NUSANTARA KEPADA KETUA RAPAT)

Cukup, ya?

KETUA DPP ALIANSI HONORER NASIONAL (AHN) (RETNO EDI KURNIADI):

Iya. Saya, Pak. Terakhir.

Izin, izin, Pimpinan. Izin, saya belum menyampaikan sesuai surat undangan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ini spesifik?

KETUA DPP ALIANSI HONORER NASIONAL (AHN) (RETNO EDI KURNIADI):

Spesifik.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Dua menit, Pak. Silakan.

KETUA DPP ALIANSI HONORER NASIONAL (AHN) (RETNO EDI KURNIADI):

Baik, terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Waalaikumsalam.

KETUA DPP ALIANSI HONORER NASIONAL (AHN) (RETNO EDI KURNIADI):

Yang terhormat dan yang saya banggakan Pimpinan Ketua Komisi II DPR RI beserta jajarannya,

Terima kasih atas undangannya yang sudah direspons baik. Kebetulan Pak Ketua Komisi *alhamdulillah* respons WA saya, Pimpinan.

Dalam hal ini kebetulan ada Ibu Rieke, ya.

Selamat berjumpa kembali, Ibu. Kita sama-sama berjuang di Tim Konsep Revisi Undang-Undang ASN 2014-2019.

Iya semoga sehat selalu Bu ya. Yang sudah dilahirkan Bu Rieke adalah Keppres 25/2018 terkait Pengangkatan Bidan PTT zaman KNASN, seperti itu.

Saya salah satunya Bu, yang mendampingi waktu ke Menseskab.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ya langsung saja, Pak. Langsung, Pak. Enggak usah nostalgia begitu.

KETUA DPP ALIANSI HONORER NASIONAL (AHN) (RETNO EDI KURNIADI):

Iya, terima kasih.

Baik, baik. Ini supaya kondisi saya tadi tidak terdata juga, Pak. Kirain dari nomor satu, nomor dua, nomor tiga, ini sudah campur aduk. Jadi konsentrasi sudah enggak jelas juga. Iya, terima kasih.

Pada intinya kita sebagai warga negara Indonesia semua berhak mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan amanah undang-undang. Dalam hal ini, terkait dengan penataan, penyelesaian tenaga non-ASN sesuai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ya, yang sudah disahkan sudah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia per tanggal 28 Oktober 2023.

Nah, di sana sudah jelas di dalam amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut, ya, selambat-lambatnya kurang lebih enam bulan akan dibuatkan turunan peraturan pemerintah sebagai dasar teknis pelaksana pengangkatan teman-teman dari non-ASN jadi ASN yang sudah sesuai dengan amanah di dalam Pasal 66 Ketentuan Penutup Bab XIV yang mana di dalamnya diamanahkan hanya melalui verifikasi validasi saja oleh pejabat yang berwenang.

Tetapi dalam kondisi yang terjadi sekarang, kenapa Pemerintah dalam hal ini eksekutif sebagai Mitra Komisi II DPR RI, ya, dari KemenPANRB, ada skema paruh dan penuh waktu? Ini kan *adopsian* dari luar negeri mau diterapkan pada posisi sekarang.

Hak Teman-teman itu, kalau Teman-teman yang sudah lama egois, mohon izin, tenaga honorer kategori dua yang sesuai dengan PP 48/2005, 43/2007, 56/2012 sudah selesai, Pak, 2013. Apalagi diperkuat dengan adanya SE Mendagri Tahun 2013.

Selain itu, tidak ada lagi istilah tenaga honorer. Maka, ada peralihan Undang-Undang Kepegawaian menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Sekarang diubah lagi ada revisi, ya.

Jadi, permasalahan-permasalahan yang memang sudah lama sampai saat ini negara belum mampu untuk menyelesaikan. Apalagi semua mempunyai hak yang sama.

Ya dalam hal ini kami dari Aliansi Honor Nasional, mohon izin Pimpinan ya, saya diamanah sebagai ketua umum pada 2019 sampai saat ini, ingin menyampaikan beberapa urgensi di antaranya, kapan kepastian akan diterbitkan turunan peraturan pemerintah? Itu sebagai dasar pelaksanaan pengangkatan teman-teman non-ASN jadi ASN?

Apalagi dalam kondisi politik sekarang, jangan sampai teman-teman jadi korban lagi, Pimpinan. Ini akan menjadi berdampak. Karena setelah undang-undang ini betul dijalankan dengan ada dua turunan PP Manajemen PNS dan Manajemen PPPK, per 1 Januari 2025 negara sudah tidak ada istilah di luar ASN. Tidak ada istilah honorer a, b, c, dan sebagainya. Yang ada adalah status ASN, PNS, dan PPPK. Ini nyawanya ada tiga bulan lagi, Pimpinan. Nyawa teman-teman.

Ya jadi mohon diperhatikan. Mohon ada keberpihakan juga kepada teman-teman semua.

Pimpinan, izin, saya bekerja 2001 sampai 2019. Cukup saya yang jadi korban kebijakan Pemerintah, Pimpinan, ya. Saya sudah menghibahkan 19 tahun bertugas kepada bangsa dan negara, cukup.

Teman-teman semua yang sudah mengabdikan kepada bangsa negara, jangan sampai menjadi korban-korban kebijakan selanjutnya, ya. Saya ingin melihat teman-teman semua yang sudah mengabdikan berpuluh-puluh tahun minimal lima tahun, semua mendapat SK menjadi ASN, PNS, ataupun PPPK.

Mungkin seperti itu, Pimpinan, ya. Kita semua dalam hal ini menghargai satu sama lain. Tetapi mudah-mudahan ada kado terbaik juga di masa-masa transisi jabatan Pak Presiden. Kemudian Pimpinan DPR RI dan jajarannya.

Saya mendoakan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan perlindungan Allah *Subhanahu Wa Taala*.

Akhirul kalam,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(...):

Izin, izin, Pimpinan. Mungkin tambahan dari AHN.

(...):

Kami dari ini.

Sebentar

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Masih ada?

Ini mana ini? Ini kalau bicara semua kami mau rapat juga, Pak.

ANGGOTA KOMISI VI/F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA INTAN PURNAMASARI, S.S., M.Hum.):

Iya, iya, cukup lah. Yang penting data, data.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Eggak, tadi kan saya tanya, spesifik enggak? Kebanyakan tidak spesifik, Pak, iya kan.

Saya kasih satu orang lagi, Pak.

Ini sama bukan, *nih?*

(...):

Tes.

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Tolong jangan teriak-teriak, Pak.

KETUA FORUM GURU PRIORITAS PERTAMA NEGERI DAN SWASTA NUSANTARA (HASNA):

Izin, Pak.

ANGGOTA KOMISI VI/F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA INTAN PURNAMASARI, S.S., M.Hum.):

Nanti lah, *barengan*.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Nanti sekalian, Pak.

Ibu dua menit, dua menit, ya.

KETUA FORUM GURU PRIORITAS PERTAMA NEGERI DAN SWASTA NUSANTARA (HASNA):

Iya *oke*, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pimpinan.

Kami dari FGPPNS, ada guru negeri dan swasta di forum kami. Kami hanya ingin mengutarakan karena di formasi untuk 2024 ini tidak ada swasta.

Nah, kami inginkan honorer ini dituntaskan yang sudah terdata juga yang belum terdata, yang ada di Dapodik Kemendikbud. Di situ kalau di Kemendikbud itu ada dari honorer, yang dari negeri berarti, terus ada GTY.

GTY adalah guru yayasan ya, karena ini mereka juga sudah lama mengabdikan tapi tidak diperhatikan, dia cuma dikasih biasanya peluangnya cuma 20%.

Selanjutnya, Bapak Pimpinan, kami ingin Komisi II ini menuntaskan PG 2021 yang lulus *passing grade* pada tahun 2021. Ada sebagian yang diangkat, ada sebagian yang belum, semuanya karena anggaran.

Selanjutnya, ada namanya *passing grade* TP (Tanpa Penempatan) di tahun 2022 dan itu 100% adalah guru negeri yang diobservasi. Ada yang sudah 20 tahun mengabdikan tapi tidak lulus, ada yang baru dua tahun mengabdikan tapi lulus karena kebijakan apa soal-soalnya itu dari kepala sekolah dan guru senior serta pengawas.

Di tahun 2023, ada lagi kami PG kategori P. *Nah*, itu sudah dimudahkan dengan diberikan apa, tes observasi tapi yang, yang melakukan adalah yang bersangkutan.

Nah, di situ juga terjadi lagi kesalahan wewenang. *Nah*, banyak yang tidak lulus juga, apa, lulus tapi tidak mendapatkan penempatan. Saya juga tidak tahu ternyata banyak yang lulus jalur lintas.

Itu selanjutnya kami, Pak, juga meminta dari pakaian. Pakaian kami itu disamakan karena adanya, apa namanya, ada perbedaan antara PNS, PPPK. Kalau kita cuma, apa namanya, PPPK itu kan putih hitam dari Senin sampai Rabu.

Nah, anak-anak saya bertanya kadang kalau saya jadi pembina upacara dia bilang, "Bu, kenapa Ibu lain bajunya?" Daripada yang sudah senior kan yang sudah tua-tua.

Apa yang saya jawab? "Ibu tidak bisa membeli baju kaki," Kuning kaki ya. *Nah*, "Jadi ibu pakai putih hitam."

Nah, setidaknya anak-anak itu sudah berpikir, "*Loh* kok beda-beda guru ini." Ya silakan kita apa selalu bercerita, jangan ada *bully* di sekolah, *bullying* ya. *Nah*, tapi ternyata gurunya yang di-*bully*.

Selanjutnya, kami minta juga jenjang karir. Jangan kami PPPK itu mentok di golongan sembilan. Kami *alhamdulillah* gajinya itu sudah *alhamdulillah* sudah lumayan, cuma jangan sampai karir kita itu, Pak, tidak bisa ke S2. Sedangkan sudah banyak teman-teman juga sudah S2.

Selanjutnya, dihapuskan kontrak yang lima tahun itu, Pak, kami otomatis langsung saja diperpanjang sampai pensiun. Karena apa? Setiap di kontrak itu pasti ada sesuatu di situ.

Lanjut lagi, Pak. Melebur supaya tidak panjang lebar, leburlah PNS dengan PPPK itu menjadi ASN. Jadi tidak ada namanya dwifungsi.

Kan kita sama-sama guru, kan?

"Kok ada PNS? Ada PPPK? Begitu juga gajinya, begitu juga pakaiannya, tidak sesuai dengan apa Pancasila, di sila kelima.

Jadi kita minta keadilan. Jadi sama tidak usah lagi PNS, ini PPPK menjadi polemik di sekolah. Jadi kita lebur saja menjadi ASN. Pemerintah juga tidak pusing, apa, memikirkan anggaran sekian, anggaran sekian.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya, oke.

KETUA FORUM GURU PRIORITAS PERTAMA NEGERI DAN SWASTA NUSANTARA (HASNA):

Dan juga kami tidak jadi, apa namanya, jadi *gap* ya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya.

KETUA FORUM GURU PRIORITAS PERTAMA NEGERI DAN SWASTA NUSANTARA (HASNA):

Antara PNS dengan PPPK.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Paham, paham.

KETUA FORUM GURU PRIORITAS PERTAMA NEGERI DAN SWASTA NUSANTARA (HASNA):

Terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Silakan, Pak.

KETUA KOMUNITAS PENGAJAR BAHASA JEPANG PROVINSI BALI:

Terima kasih atas waktunya.

Bapak Pimpinan, saya langsung saja.

*Om swastiastu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Namo budaya,
Rahayu,
Rahayu,*

Baik, saya sama sepertinya seperti yang Ibu ini dari guru. Jadi khususnya guru bahasa Jepang. *Nah*, kenapa saya bisa hadir di sini sekarang? Jadi, izin Pimpinan, saya ingin menyampaikan beberapa hal.

Yang pertama, kenapa saya bisa hadir hari ini di ruang sidang, itu yang pertama. Saya mengambil data dari fakta apa yang saya alami sebagai guru bahasa Jepang dan mewakili teman-teman komunitas pengajar bahasa Jepang yang ada di Provinsi Bali yang sampai saat ini dari tahun saya tamat kuliah sampai sekarang itu bukaan untuk Bahasa Jepang itu sangat minim sekali di daerah *notabene* daerah pariwisata di Bali, Bapak.

Dan itu semuanya teman-teman bahasa Jepang itu ada hampir di semua sekolah SMA, SMK yang ada di Bali dan adapun beberapa SD dan SMP yang mengajarkan bahasa Jepang. Kenapa cuma jumlah formasi bahasa Jepang ini sangat minim sekali Bapak, di provinsi Bali *notabene* daerah pariwisata yang membutuhkan?

Nah, agar tidak cerita, ada kejadian lagi seperti tahun kemarin ini. Ada formasi, gurunya ada yang non-PNS itu 143 orang yang saya terdata sekarang itu cuma 12 orang yang dikasih formasi bahasa Jepang.

Nah, semuanya ikut tes dan semuanya lulus *passing grade*. *Nah*, yang 12 ini saja yang lulus, sisanya lulus *passing grade* dan belum ada kepastian sampai sekarang.

Nah, dalam forum ini, saya mohon yang lulus *passing grade* ini kalau bisa itu sudah langsung lulus lagi tanpa tes. Jadi seperti itu untuk pengangkatan PPPK tahun 2024.

Nah, kemudian biar tidak ada lagi kejadian bahwa sekolah yang tidak membutuhkan guru yang seharusnya itu datang ke sekolah tersebut membawa formasi seperti ini.

Misal contohnya, sekarang ada teman saya yang mengajar bahasa Jepang di salah satu SMK yang ada di Bali. Di sana dibutuhkan guru bahasa Jepang tetapi yang datang PPPK Kimia. *Nah*, kalau di SMK Pariwisata yang dibutuhkan kan kemampuan berbahasa Jepangnya. Jadi bukan Guru Kimianya, seperti itu. Jadi yang ada di lapangan seperti itu, Pimpinan.

Kemudian yang sama seperti Ibu tadi ini saya menambahkan. Dari tahun kemarin, pembukaan PPPK itu saya menyampaikan aspirasi dari Teman-

teman yang honor yang di swasta atau GTY (Guru Tetap Yayasan) itu agar bisa juga masuk ikut dalam seleksi CPNS ataupun PPPK tahun 2024.

Kemudian, yang lagi satu, Pimpinan. Saya sudah dari 2008 ini mengabdikan sampai sekarang sebagai guru bahasa Jepang di salah satu SMA yang ada di Bali. *Nah*, itu saya sampai sekarang pun, yang *dulu* diangkat itu malahan yang murid saya sekarang yang ada di sebelah saya. Dan saya ditanya sebagai guru, "Bapak kok masih pakai baju *ndak* atau beda sama teman-teman yang lain?"

Sampai di seperti itu dan itu pun murid saya yang sudah *dulu* yang baru dua tahun, yang baru setahun ataupun tiga tahun itu yang *dulu*, Bapak Pimpinan. Jadi seperti itu di lapangan kejadiannya.

Nah, itu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan forum kali ini, Pimpinan. Terima kasih banyak.

Om santi santi santi om,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Walaikumsalam.

Arigatou gozaimasu.

(...):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA KOMUNITAS PENGAJAR BAHASA JEPANG PROVINSI BALI:

Arigatou gozaimasu.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ya, Bapak/Ibu sekalian.

(...):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Terima kasih.

(...):

Interupsi, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Di sini enggak ada interupsi, Pak.

Sudah, Pak. Sudah, Pak.

Cukup, Pak. Ya, cukup.

(...):

Saya menyampaikan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Ini RDPU paling lama selama saya DPR, Pak.

Mohon maaf aja, Pak

(...):

Mohon izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Ini, Pak, ya.

Bapak/ Ibu sekalian,

Dengan tidak mengurangkan rasa hormat kepada Bapak/Ibu sekalian, kami sudah menampung dan kami sudah pahami semua apa masalah yang mau dibawa ke sini dan sebagian sudah kami terima aspirasi. Nanti berkasnya setelah selesai rapat ini bisa diserahkan langsung kepada kami di tempat ini.

Dan yang kedua, kami akan bersurat secara resmi kepada kementerian-kementerian terkait. Tentu tembusannya, seperti misalnya kalau dia Kementerian Pendidikan tentu kami harus tembuskan kepada Komisi IX, saudara kami tersebut, ya karena bukan mitra kami.

Oleh karena itu, tentu kami inginkan data dan/atau berkas yang valid dari Bapak/Ibu sekalian untuk bisa kami serahkan kepada Kementerian ATR, Kementerian MenPANRB dan Kepala BKN dalam waktu secepatnya ketika kami sudah menerima berkas dari Bapak/Ibu sekalian.

Terima kasih kepada Ibu Dr. Rieke Diah Pitaloka yang sudah berani dan nekat mampir ke Komisi II.

(...):

Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Ya, terima kasih.

(...):

Pimpinan, mohon izin.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Kepada teman-teman Anggota, terima kasih kepada Bapak/Ibu sekalian. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekhilafan dalam sikap dan cara berbicara kami, dalam perilaku kami, untuk itu kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih.

Wabillahi taufik walhidayah.

Wassalamualikum warrahmatullahi wabaraktuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.07 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II DPR RI**



**Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
197504202002122002**